

## Analisis Faktor Perencanaan Pendidikan: Politik, Identitas Nasional, Ekonomi, Agama, dan IPTEK

\*<sup>1</sup>Layalil Maghfiroh Zain, <sup>2</sup>Samsul Susilawati

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

email: \*<sup>1</sup>[layalilmfhz@gmail.com](mailto:layalilmfhz@gmail.com), <sup>2</sup>[susilawati@pips.uin-malang.ac.id](mailto:susilawati@pips.uin-malang.ac.id)

### Abstract

Educational planning is a strategic process influenced by various interrelated internal and external factors. This study aims to analyze how political, national identity, economic, religious, and science and technology (S&T) factors have a positive impact as well as pose challenges to the development of education in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature review method, namely by examining books, national and international journals, and relevant previous studies. The results of the study show that politics plays a dominant role in directing education policy, but overly dynamic policy changes often lead to inconsistencies. National identity has proven to be important in shaping the character and identity of students through the internalization of national values. Economic factors are a major determinant of the quality and equity of education, while religion provides a moral foundation for the formation of students' personalities. Meanwhile, advances in science and technology encourage learning innovation, but also present challenges in the form of the digital divide and infrastructure limitations. Overall, this study concludes that effective educational planning must consider all these factors in an integrated manner so that the education system can develop in a sustainable, relevant, and adaptive manner in response to changing times.

**Keywords:** *Educational Planning, Educational Factors, Politics, Economics, and Science and Technology*

### Abstrak

Perencanaan pendidikan merupakan proses strategis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor politik, identitas nasional, ekonomi, agama, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memberikan dampak positif sekaligus tantangan terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku, jurnal nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik memiliki peran dominan dalam mengarahkan kebijakan pendidikan, namun perubahan kebijakan yang terlalu dinamis sering menimbulkan ketidakkonsistenan. Identitas nasional terbukti penting dalam membentuk karakter dan jati diri peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Faktor ekonomi menjadi penentu utama kualitas dan pemerataan pendidikan, sementara agama memberikan fondasi moral dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Adapun kemajuan IPTEK mendorong inovasi pembelajaran, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan seluruh faktor tersebut secara terpadu agar sistem pendidikan mampu berkembang secara

berkelanjutan, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman

**Kata Kunci:** *Perencanaan Pendidikan, Faktor-Faktor Pendidikan, Politik, Ekonomi, Dan IPTEK*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah landasan utama dalam pembangunan suatu bangsa, karena melalui pendidikan kita membentuk generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Namun dalam praktiknya, penyusunan perencanaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor eksternal dan internal, seperti kebijakan politik, identitas nasional, kondisi ekonomi, nilai agama, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK). Jika salah satu dari faktor ini diabaikan, maka rancangan pendidikan yang dihasilkan bisa kurang relevan, tidak berkelanjutan, atau bahkan tidak efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Faktor politik memiliki pengaruh sangat besar dalam sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan pemerintah, pengalokasian anggaran, struktur kurikulum, dan regulasi pendidikan nasional seringkali berubah mengikuti dinamika kekuasaan politik. Penelitian Pengaruh Politik dalam Bidang Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan baik secara makro maupun mikro sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik seperti alokasi dana dan perumusan kurikulum publik. Kebijakan yang tidak stabil bisa menjadi tantangan besar dalam penerapan strategi pendidikan yang konsisten dan jangka panjang (Puwanto, n.d.).

Sementara itu, identitas nasional menjadi aspek penting lainnya dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan strategis dalam menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan di tengah keragaman budaya Indonesia. Sebagai contoh, artikel Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional menunjukkan bahwa PKn membantu memperkuat kesadaran nasional dan pemahaman tentang nilai kebangsaan, namun juga menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya. Dengan demikian, penguatan identitas nasional harus diperhitungkan dalam setiap langkah perencanaan pendidikan agar siswa tidak kehilangan jati diri bangsa di era globalisasi (Azzahra et al., 2024a).

Lebih jauh, faktor ekonomi, agama, dan kemajuan IPTEK juga tidak kalah penting. Kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan dana pendidikan dan infrastruktur. Nilai-nilai agama memberikan landasan moral dan karakter peserta didik, sementara kemajuan IPTEK mengubah cara penyampaian materi, metode pembelajaran, dan akses informasi. Untuk menghasilkan suatu perencanaan pendidikan yang benar-benar efektif, semua faktor tersebut perlu dianalisis secara komprehensif

bagaimana masing-masing memberikan dampak positif, serta juga bagaimana tantangan yang bakal muncul. Maka dari itu, artikel ini akan mengeksplorasi dampak positif dan tantangan dari faktor-faktor politik, identitas nasional, ekonomi, agama, dan IPTEK terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran post-positivisme dan bertujuan memahami realitas apa adanya, tanpa rekayasa atau perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. (Sugiono, 2014) Pendekatan ini tidak berusaha membatasi atau menghilangkan faktor-faktor yang ada di lingkungan penelitian. Sebaliknya, peneliti justru memanfaatkan beragam teknik untuk menangkap pandangan, pengalaman, dan pemaknaan dari para informan. Dengan begitu, penelitian kualitatif diharapkan mampu menggali pemahaman yang lebih mendalam serta menyajikan gambaran yang kaya mengenai fenomena yang diteliti (Rukin, 2019). Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari, buku-buku rujukan, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor perencanaan pendidikan, dalam kajian interaksi politik, identitas nasional, ekonomi, agama, dan kemajuan iptek (Fadli, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Pendidikan Politik**

Faktor politik sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Kebijakan pemerintah, undang-undang, hingga regulasi kurikulum adalah bentuk nyata dari intervensi politik terhadap pendidikan. Setiap perubahan pemerintahan biasanya diikuti dengan perubahan kebijakan, misalnya perubahan kurikulum dari KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas dan visi politik akan berdampak langsung pada perencanaan pendidikan di Indonesia.

Politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan karena kebijakan negara akan menentukan arah, isi, dan strategi dalam perencanaan pendidikan. Hal ini terlihat jelas pada kebijakan kurikulum, anggaran pendidikan, hingga pelaksanaan otonomi daerah. Misalnya, alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan adalah bentuk nyata intervensi politik terhadap pendidikan. Selain itu, kebijakan otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola pendidikan, meskipun tetap menghadapi kendala sumber daya dan keterbatasan dana (Puwanto, n.d.).

Lebih jauh, Tilaar (2003) menjelaskan bahwa politik memengaruhi

pendidikan melalui berbagai pendekatan, seperti moral religius, intelektualisme, nasionalisme, demokrasi, hingga pembangunan ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia. Setiap pendekatan ini menunjukkan bagaimana negara mengarahkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan ideologi yang dianut. Misalnya, di era demokrasi, pendidikan berfungsi menumbuhkan sikap demokratis pada peserta didik, sementara pada masa nasionalisme pendidikan digunakan untuk memperkuat identitas bangsa.

Selain dipengaruhi politik, pendidikan juga berperan penting dalam membentuk kualitas politik suatu negara. Pendidikan yang baik mampu melahirkan generasi berkarakter, kritis, dan profesional sehingga berkontribusi pada pembangunan demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Sebaliknya, lemahnya pendidikan dapat menghasilkan politikus yang rendah moral, yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang erat, di mana politik mengarahkan jalannya pendidikan, sementara pendidikan membentuk kualitas kehidupan politik bangsa (Puwanto, n.d.).

Politik memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Perubahan rezim politik seringkali diikuti dengan perubahan kebijakan pendidikan, terutama pada kurikulum. Sejak 1947 hingga era "Merdeka Belajar", kurikulum di Indonesia telah berkali-kali berubah mengikuti arah politik yang sedang berkuasa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik (Florentino, 2024).

Selain kurikulum, aspek pendanaan juga menjadi bukti nyata pengaruh politik dalam pendidikan. Meskipun secara konstitusi pemerintah wajib mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan, kenyataannya sebagian besar dana terserap untuk gaji guru, sehingga menyisakan sedikit anggaran untuk peningkatan kualitas, sarana prasarana, dan inovasi pendidikan. Kebijakan sertifikasi guru pun belum efektif karena lebih berorientasi pada tunjangan daripada peningkatan profesionalisme guru.

### **Identitas Nasional**

Di Indonesia, identitas nasional tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai perekat bangsa dan menjadi landasan dalam membentuk kepribadian generasi muda melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas nasional, terutama di era globalisasi ketika arus budaya luar mudah masuk dan memengaruhi pola pikir masyarakat. Melalui kurikulum dan proses pembelajaran, nilai-nilai kebangsaan dapat ditanamkan agar peserta didik

memiliki rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman, dan tetap menjaga persatuan bangsa. Program seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah contoh nyata upaya pendidikan dalam menanamkan identitas nasional pada siswa.

Setiarsih menegaskan bahwa penguatan identitas nasional dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan sopan santun dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran agar peserta didik tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak generasi cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter sesuai dengan jati diri bangsa (Ari Setiarsih, 2016).

Selain melalui pendekatan multikultural berbasis kearifan lokal, penguatan identitas nasional juga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal yang lebih spesifik, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. PKn menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, karena secara langsung membekali peserta didik dengan nilai-nilai Pancasila, semangat persatuan, dan rasa cinta tanah air. Dengan demikian, penguatan identitas nasional dalam perencanaan pendidikan tidak hanya ditekankan pada aspek budaya lokal, tetapi juga diperkuat melalui mata pelajaran yang dirancang khusus untuk membentuk warga negara yang berkarakter.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun identitas nasional generasi muda. Melalui mata pelajaran ini, peserta didik dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan, kesadaran bernegara, serta sikap toleransi yang menjadi fondasi persatuan bangsa. Azzahra, Nawry, dan Nelwati (2024) menjelaskan bahwa PKn bukan hanya menyampaikan teori tentang kewarganegaraan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan kearifan lokal. Dengan demikian, PKn menjadi salah satu instrumen strategis dalam perencanaan pendidikan untuk memperkuat identitas nasional di era globalisasi (Azzahra et al., 2024b).

### **Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam perencanaan pendidikan. Keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan, karena setiap aktivitas pendidikan memerlukan biaya, baik untuk penyediaan sarana prasarana, pengadaan tenaga pendidik, maupun penyelenggaraan program pembelajaran. Menurut Ghulam (2019), landasan ekonomi menjadi dasar penting dalam dunia pendidikan, sebab tanpa dukungan finansial yang memadai, pelaksanaan pendidikan tidak akan berjalan optimal. Dengan demikian, perencanaan pendidikan harus selalu mempertimbangkan kondisi ekonomi sebagai faktor penentu keberhasilan.

Selain itu, perencanaan pendidikan juga berkaitan erat dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Pengelolaan anggaran pendidikan yang tepat akan membantu tercapainya pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran. Jika pendanaan kurang diperhatikan, maka yang terjadi adalah ketimpangan pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, faktor ekonomi tidak hanya menentukan keberlangsungan kegiatan pendidikan, tetapi juga memengaruhi pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat (Ghulam, 2019).

Lebih jauh lagi, faktor ekonomi juga menentukan arah dan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan yang mendapat dukungan ekonomi kuat akan mampu mencetak generasi yang unggul, produktif, dan siap menghadapi tantangan global. Sebaliknya, lemahnya kondisi ekonomi dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, meningkatnya angka putus sekolah, serta keterbatasan mutu lulusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan yang efektif memerlukan landasan ekonomi yang kokoh agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan bangsa secara berkelanjutan.

### **Agama**

Perencanaan pendidikan yang berbasis agama memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan mutu pendidikan di Indonesia. Nuryasin dan Mitrohardjono (2020) menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan Islam harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek makro dan mikro. Pada tingkat makro, perencanaan pendidikan Islam diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat luas dengan landasan visi dan misi pendidikan nasional yang bernafaskan nilai-nilai agama. Sementara pada tingkat mikro, perencanaan pendidikan Islam diterapkan dalam lingkup satuan pendidikan melalui kurikulum, program pembelajaran, serta kegiatan keagamaan yang membentuk karakter siswa. Dengan demikian, pendidikan agama tidak hanya menjadi mata pelajaran tambahan, melainkan fondasi penting dalam perencanaan pendidikan yang membentuk generasi berakhlak mulia, beriman, serta mampu beradaptasi dengan tantangan zaman (Nuryasin & Mitrohardjono, 2019).

Selain itu, faktor agama dalam perencanaan pendidikan juga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan moral peserta didik. Pendidikan yang hanya berfokus pada aspek kognitif tanpa memperhatikan aspek afektif dan spiritual akan menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi lemah dalam moralitas. Oleh karena itu, pendidikan berbasis agama memberikan dasar etika dan akhlak mulia, sehingga peserta didik tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang berintegritas. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan manusia beriman,

bertakwa, dan berakhlak mulia.

Lebih jauh, agama juga berperan penting dalam menciptakan harmonisasi sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui perencanaan pendidikan yang menekankan nilai-nilai agama, peserta didik diajarkan untuk menghargai perbedaan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga persatuan bangsa. Tanpa adanya landasan agama, pendidikan berpotensi kehilangan arah moral dan melahirkan generasi yang cerdas namun kurang bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, faktor agama menjadi salah satu pilar utama dalam perencanaan pendidikan yang harus diperhatikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara utuh, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun spiritual.

### **Kemajuan IPTEK**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi perencanaan pendidikan. Perubahan zaman yang dipicu Revolusi Industri 4.0 menuntut lembaga pendidikan untuk segera merespons perkembangan teknologi dengan menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar tetap relevan. Sebagai contoh, penggunaan Learning Management Systems (LMS), Augmented Reality (AR), Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI) di dalam kurikulum dijelaskan dalam penelitian oleh Khoirunnisa et al. (2025) sebagai elemen penting dalam meningkatkan akses, personalisasi pembelajaran, dan kolaborasi antar siswa.

Walau demikian, kemajuan IPTEK juga menghadirkan tantangan yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pendidikan. Salah satunya adalah kesenjangan digital, tidak semua daerah memiliki infrastruktur internet yang baik, akses komputer atau gadget yang memadai, juga literasi digital guru dan siswa yang masih rendah. Khoirunnisa dkk. (2025) menunjukkan bahwa ketidakmerataan kondisi tersebut dapat menghambat efektifitas implementasi kurikulum digital, meski secara teknis peluangnya besar (Ali et al., n.d.).

Untuk mengoptimalkan manfaat IPTEK dalam pendidikan, perencanaan pendidikan harus memasukkan strategi yang holistik dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan kompetensi digital guru menjadi langkah mendesak. Guru bukan hanya dituntut mampu mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga perlu menguasai pedagogi digital, seperti penggunaan Learning Management System (LMS), pemanfaatan big data untuk evaluasi pembelajaran, dan integrasi media digital interaktif dalam kelas.

Kedua, investasi infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas dalam perencanaan pendidikan. Tidak cukup hanya menyediakan komputer atau jaringan internet di kota besar, tetapi juga memastikan sekolah di daerah terpencil memiliki akses yang sama. Hal ini mencakup penyediaan perangkat keras, jaringan internet yang stabil, serta pusat data untuk mendukung pembelajaran

digital. Tanpa pemerataan infrastruktur, kesenjangan digital akan semakin melebar dan menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan.

Ketiga, pengembangan kurikulum adaptif sangat penting agar isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang cepat berubah. Kurikulum harus fleksibel dalam memasukkan kompetensi baru, misalnya literasi digital, coding, kecerdasan buatan, atau etika teknologi, sehingga lulusan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Keempat, perlu adanya kebijakan inklusif agar teknologi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, misalnya sekolah unggulan atau daerah perkotaan. Kebijakan pendidikan berbasis IPTEK harus mengutamakan prinsip pemerataan, sehingga semua siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi bisa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Dengan strategi tersebut, kemajuan IPTEK tidak hanya menjadi tren sesaat, melainkan benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak peningkatan mutu pendidikan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global.

## **Dampak Positif dan Tantangan Dari Masing-Masing Faktor Terhadap Pengembangan Pendidikan**

### **Faktor Politik**

Politik memainkan peran krusial dalam perencanaan pendidikan karena melalui kebijakan politik, pemerintah menentukan arah pembangunan pendidikan. Salah satu dampak positif dari faktor politik adalah adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan, misalnya kebijakan wajib belajar 12 tahun dan program Indonesia Pintar. Dengan adanya dukungan anggaran yang dialokasikan minimal 20% dari APBN, pendidikan di Indonesia mendapat jaminan untuk terus berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor politik memiliki potensi besar dalam memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Puwanto, n.d.).

Namun, di sisi lain, politik juga menghadirkan tantangan yang cukup besar. Salah satu persoalan utama adalah perubahan kebijakan yang terlalu sering terjadi akibat pergantian pemerintahan. Kurikulum yang berganti-ganti dalam waktu singkat menyebabkan proses belajar mengajar tidak konsisten, bahkan membingungkan bagi guru maupun peserta didik. Selain itu, adanya kepentingan politik tertentu terkadang membuat pendidikan menjadi sarana legitimasi kekuasaan, bukan semata-mata untuk peningkatan mutu. Hal ini menegaskan bahwa meskipun politik memiliki dampak positif, tantangan yang ditimbulkan juga perlu diantisipasi agar pendidikan tetap berjalan sesuai tujuan nasional.

### **Faktor IPTEK**

Kemajuan IPTEK membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Dampak positif yang paling nyata adalah pemanfaatan teknologi digital dalam

proses pembelajaran, seperti penggunaan e-learning, aplikasi konferensi daring, dan sistem manajemen pembelajaran (LMS). Kehadiran teknologi ini memberikan fleksibilitas yang tinggi, di mana proses belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, IPTEK juga membuka peluang luas bagi peserta didik untuk mengakses informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber, sehingga mendorong lahirnya generasi yang lebih adaptif dan kreatif (Maritsa et al., 2021).

Namun, di balik manfaatnya, IPTEK juga menimbulkan tantangan serius. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Kesenjangan digital ini berpotensi memperlebar ketidakmerataan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, penggunaan teknologi tanpa kontrol juga dapat berdampak negatif, seperti ketergantungan berlebihan pada perangkat digital, penyalahgunaan media sosial, serta berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, meskipun IPTEK membawa banyak peluang, perencanaan pendidikan harus mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul agar pemanfaatannya benar-benar efektif.

#### **Faktor Ekonomi**

Ekonomi merupakan fondasi penting dalam perencanaan pendidikan. Dampak positif yang ditimbulkan adalah tersedianya investasi yang cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan dukungan dana yang memadai, sekolah dapat memperbaiki sarana prasarana, meningkatkan kompetensi guru, serta memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Negara dengan kondisi ekonomi yang baik biasanya mampu melahirkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa.

Di sisi lain, ekonomi juga menjadi tantangan ketika ketimpangan terjadi di tengah masyarakat. Banyak keluarga dari kalangan menengah ke bawah yang kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka, meskipun pemerintah telah menyediakan program bantuan. Ketimpangan ekonomi ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sekolah di beberapa wilayah. Selain itu, daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi rendah juga cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas, sehingga mutu pendidikan menjadi kurang optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun ekonomi adalah pendukung utama pendidikan, ia juga dapat menjadi penghambat jika tidak dikelola dengan baik.

#### **Faktor Identitas Nasional**

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun identitas nasional di tengah perubahan sosial dan budaya yang dinamis. Melalui mata pelajaran ini, peserta didik tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa. PKn menjadi sarana strategis dalam membentuk karakter bangsa

agar generasi muda memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi dan memahami pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pendidikan berfungsi bukan hanya sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai media pembentukan jati diri bangsa yang berakar pada nilai-nilai Pancasila (Azzahra et al., 2024).

Namun demikian, arus globalisasi yang kian deras menghadirkan tantangan besar bagi upaya mempertahankan identitas nasional. Masuknya budaya asing yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal dapat memengaruhi pola pikir dan gaya hidup generasi muda. Fenomena ini menyebabkan sebagian remaja cenderung kehilangan rasa bangga terhadap budayanya sendiri. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan secara kreatif dan kontekstual agar mampu menanamkan nilai nasionalisme dengan pendekatan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan yang berbasis nilai kebangsaan diharapkan dapat menjadi benteng bagi peserta didik dalam menghadapi pengaruh global yang dapat melemahkan jati diri bangsa.

### **Faktor Agama**

Agama memiliki peran penting dalam membangun fondasi moral dan spiritual dalam pendidikan. Dampak positif yang ditimbulkan adalah lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Pendidikan agama membantu peserta didik memahami nilai-nilai etika, toleransi, serta tanggung jawab sosial yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini membuat pendidikan agama menjadi salah satu pilar utama dalam mencetak generasi yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan moralitas (Qur et al., 2021).

Namun, agama juga menghadirkan tantangan dalam pengembangan pendidikan. Perbedaan tafsir antar kelompok terkadang menimbulkan perdebatan bahkan konflik yang dapat memengaruhi dunia pendidikan. Selain itu, perkembangan budaya modern yang sering kali tidak selaras dengan nilai agama bisa melemahkan peran pendidikan agama di sekolah. Tantangan lainnya adalah bagaimana pendidikan agama bisa disampaikan dengan metode yang kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan esensi nilai spiritualnya. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan perlu menempatkan agama secara proporsional sebagai pilar moral yang mendukung pembangunan karakter bangsa.

### **KESIMPULAN**

Perencanaan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu politik, identitas nasional, ekonomi, agama, dan kemajuan IPTEK. Faktor politik menjadi penentu utama arah kebijakan pendidikan, mulai dari kurikulum, pendanaan, hingga regulasi yang mengatur praktik pembelajaran.

Namun perubahan kebijakan yang terlalu sering juga dapat menghambat konsistensi pelaksanaan pendidikan. Identitas nasional berperan dalam membentuk jati diri peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan agar generasi muda mampu menjaga persatuan dan tetap berpijak pada budaya lokal di tengah arus globalisasi. Dari sisi ekonomi, kualitas pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan pemerataan akses. Kondisi ekonomi yang kuat dapat meningkatkan mutu sarana prasarana, kompetensi guru, dan pemerataan layanan pendidikan, sementara ketimpangan ekonomi menjadi hambatan bagi banyak daerah dan keluarga. Faktor agama hadir sebagai fondasi moral yang membentuk karakter peserta didik agar tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu menghargai perbedaan. Sementara itu, kemajuan IPTEK mendorong inovasi pembelajaran sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur dan kompetensi digital agar tidak menimbulkan kesenjangan baru. Secara keseluruhan, perencanaan pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan seluruh faktor tersebut secara komprehensif. Integrasi antar faktor diperlukan agar pendidikan mampu menjawab tantangan zaman, tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. I. N., Alifah, N., & Safira, S. Y. A. (n.d.). Curriculum Digitalization: The Impact of Technology on Curriculum Development in The Era of Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal of Educational Research and Technology*, 5(2), 179-190.
- Azzahra, A. H., Nawry, N., & Nelwati, S. (2024a). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun identitas nasional. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 23-31.
- Azzahra, A. H., Nawry, N., & Nelwati, S. (2024b). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional. 3(2), 23-31.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Florentino, M. (2024). Pengaruh Politik Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Terutama dalam Pendidikan Dasar. 6(1), 36-40.
- Ghulam, G. (2019). Landasan ekonomi dalam pendidikan. *TARBAWI*, 7(2), 87-100.
- Maritsa, A., Salsabila, U. H., Wafiq, M., Anindya, P. R., & Ma'shum, M. A. (2021). Pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(2), 91-100.
- Nuryasin, M., & Mitrohardjono, M. (2019). Strategi perencanaan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*,

4(2).

Puwanto, N. A. (n.d.). *Pengaruh politik dalam bidang pendidikan*. 02, 1–11.

Qur, I. A. I. A.-, Sosial, P., & Iptek, B. D. A. N. (2021). *Program Studi Pendidikan Agama Islam RELEVANSI PENDIDIKAN ISLAM DENGAN SERTA PRO-KONTRA EFISIENSI PENDIDIKAN* Jurnal TAUJIH Program Studi. 14(01), 34–58.

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Setiarsih, A. (2016). *Penguatan Identitas Nasional Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal*.

Sugiono, P. D. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif*. pdf. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 12, 42.